



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/378 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KONSELING/PARALEGAL PADA KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN
RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan nama-nama tenaga pendamping dan tenaga ahli pendamping kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan mengalami perubahan maka lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 188.4/297 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tenaga Konseling/Paralegal pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/297 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Konseling/Paralegal pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

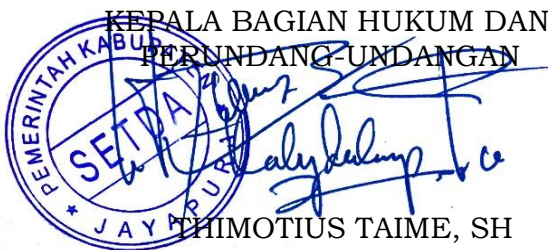
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/378 TAHUN 2023
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023

NAMA-NAMA TENAGA PENDAMPING KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN BAGI
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	UTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pdt.ABIHUD YAKADEWA	SENTANI	KONSELING
2	YEHUDA DEMETOUW	DEPAPRE	DAS YEWENA
3	OBETH RICKY A.WOUW	NIMBOKRANG	PKM NIMBOKRANG
4	AGUSTA.ANSEK KASIMAT	NIMBOKRANG	PARALEGAL
5	SUSANA SANGGRANGBANO	NIMBORAN	PARALEGAL
6	MARTINUS SUEYMALA	KEMTUK	PARALEGAL
7	ENGCELINA WAFUMILENA	DEPAPRE	PEMERHATI PEREMPUAN
8	ANIKE Y.YEWI	KEMTUK GRESI	PEMERHATI PEREMPUAN
9	YOHANA YABOISEMBUT	KEMTUK	PARALEGAL
10	NAOMI JACK	UNURUM GUAY	PARALEGAL
11	MARDIANA. TILJUIR	SENTANI	PARALEGAL
12	Z. RINI	SENTANI	PKM SENTANI
13	SIRIA TONAPA	WAIBU	PKM KANDA
14	YOSEP HEMBRING	NAMBLONG	DAS NAMBLONG
15	FEMI VANDA MOFU	SENTANI BARAT	PKM SENTANI BARAT
16	FILEP ONGGE	SENTANI TIMUR	PARALEGAL
17	Z. RITA SADA	SENTANI TIMUR	PKM SENTANI TIMUR
18	ROSIANA ENTONG	WAIBU	PEMERHATI PEREMPUAN
19	YULIANA KELPI	UNURUM GUAY	PARALEGAL
20	AGUS PANGKATANA	WAIBU	PARALEGAL
21	MARIA SAFARIA	YAPSI	PKM YAPSI
22	DEBORA HIRWA	KAUREH	PARALEGAL
23	YOHANA YARU	KEMTUK GRESI	PARALEGAL
24	ASNAT.TIERT	SENTANI/HINEKOMBE	PEMERHATI PEREMPUAN
25	Pdt.POLOVINA RUMBINO	SENTANI BARAT	KONSELING
26	ISAK A.DODOP	DEMTA	PKM DMTA
27	SARLOTHA EYBE	DEMTA	PEMERHATI PEREMPUAN
28	ROXIE YAUNG	WAIBU	PKM WAIBU
29	FEBBY RANSAI	DEPAPRE	PKM DEPAPRE
30	TIRZANIZIA.F.HEMBRING	KAUREH	PARALEGAL
31	ANTONETHA OHE	SENTANI TIMUR	PEMERHATI PEREMPUAN
32	Pdt.ROSALINA ELUAY	YAPSI	KONSELING
33	YESAYA BANO	NIMBORAN	PARALEGAL
34	MARITJE M.NEBORE	SENTANI/ DOYO	PARALEGAL
35	BEATRIK MEBRI	SENTANI	PEMBANTU ADMINISTRASI SIMPONI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
36	GRATIO.R	SENTANI	ADMINISTRASI
37	JUMRANA	STAF PPA POLRES	BAGIAN MEDIASI PPA
38	FRENGKI PANGKALI, SH	RESKRIM	KONSELING
39	RUT IRIANI RUMKOREM	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ADMINISTRASI SIMPONI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
40	HERMINA MANDOAWALI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BENDAHARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

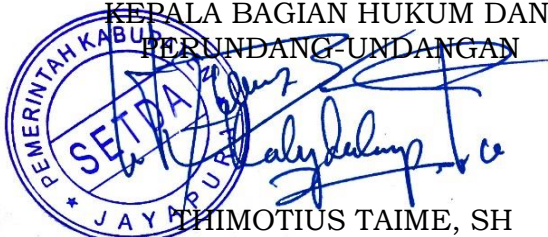
salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/378 TAHUN 2023
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023

NAMA-NAMA TENAGA AHLI PENDAMPING KEGIATAN PENYEDIAAN
LAYANAN RUJUKAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG
MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	FRANSISKA PAIKI,SH	KEPALA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES
2	NUR AIDA DUWILA,SH	LBH APIK JAYAPURA
3	SELFIANA SANGGENAFA,SH	LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PAPUA
4	Pdt.ALBERT YOKU	FKUB
5	MIRYAM Y,SOUMILENA,SE,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	BEATRIX, N AWAOITAUW, S.Sos, M.Si	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	ELFRIDA S. JAKARMILENA, S.Hut	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, POLITIK HUKUM, HAM DAN SOSIAL BUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	KATRIANA. A. BORUMEY, S.Sos	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	dr. MALA RISAMASU	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
10	SITI AKMIANTI,SH	KETUA LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PAPUA
11	NOVITA OPKI, SH.	LBH APIK JAYAPURA
12	HERLINA TOKORO,S.Sos,M.Si	KEPALA BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK, PENELANTARAN ANAK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	RIANA KAROLINA TUNGGGA	KEPALA BIDANG RAHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA
14	IVONE TRESNAWATI, S.IP,. M.H	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCACATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA
15	DELILA RUMAYOMI	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK
16	RENDI TOTOMBU	ADM SIMPONI PROVINSI
17	SELFIANA KUBIARI,SH	KASIE PEMENUHAN HAK ANAK
18	ERNA DELILA S.Kep.Ns	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN
19	Pdt.OCE AWOM	PUSAT PELATIHAN DAN PEMBINAAN WANITA JAYAPURA
20	MERLIN DEMETOUW	STAF PPA POLRES

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

